

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Jawa Tengah

Nama Resmi	: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Ibukota	: Semarang
Luas Wilayah	: 32.800,69 Km ²
Jumlah Penduduk	: 34.897.757 jiwa
Suku Bangsa	: Jawa
Agama	: Islam : 14.942.383 jiwa, Kristen Protestan : 241.423 jiwa, Katholik : 181.340 jiwa, Buddha : 34.182 jiwa, Hindu : 13.988 jiwa, dan lainnya : 6.531 jiwa.
Wilayah Administrasi	: Kab.: 29, Kota : 6, Kec.: 573, Kel.: 750, Desa : 7.809
Lagu Daerah	: Gambang Suling, Suwe Ora Jamu, Gundul Pacul, Lir Ilir

a. Sejarah Perkembangan Provinsi Jawa Tengah

Sejak jaman penjajahan Belanda Jawa Tengah sudah dikenal sebagai suatu propinsi yang didasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat itu.

1) Jaman Penjajahan Belanda

Pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewest* (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District / Standgeemente* (Kotapraja), dan *Oderdistrict*(Kecamatan) berdasarkan

Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland -Indie
(Decentralisatie Wet 1903).

2) Jaman Pendudukan Jepang

Jepang telah melakukan perubahan dalam Tata Pemerintahan Daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) bahwa seluruh Jawa terbagi dalam wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son ConderDistrikdan Ku(Kelurahan) kecuali Vorstenkendeh (Kerajaan-kerajaan)

3) Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, menetapkan Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan di UU No. 10 tahun 1950 sesuai dengan PP No. 31 tahun 1950 dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950 dan ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 7 tahun 2004.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang yang mengatur tentang system Pemerintah Daerah sejak merdeka hingga sekarang peraturan adalah :

- 1) UU No. 1 Tahun 1945, otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat
- 2) UU No. 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak banyaknya;
- 3) UU No. 1 Tahun 1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya;

- 4) PenPres No. 6 Tahun 1959;
- 5) UU No. 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya.
- 6) UU No. No. 5 Tahun 1974, dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab;
- 7) UU No. 22 Tahun 1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab;
- 8) UU No. 32 Tahun 2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

c. Kepala Pemerintahan:

Jawa Tengah dipimpin oleh 14 (empat belas) Kepala Pemerintahan sejak merdeka sampai dengan sekarang yaitu :

- 1) R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
- 2) KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
- 3) R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
- 4) RMT. Mangunegoro, Tahun 1954s/d 1958;
- 5) R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
- 6) RM Hadisoebeno Sosrowerdojo, Tahun 1958 s/d 1960;
- 7) Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966
- 8) Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
- 9) Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
- 10) H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
- 11) Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;

- 12) Mardiyanto, Tahun 1998 s/d 2007;
- 13) Ali Mufiz, Tahun 2007 s/d 2008;
- 14) Bibit Waluyo, Tahun 2008 s/d 2013
- 15) Ganjar Pranowo. Tahun 2013 - sekarang

d. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah

DPRD Propinsi Jawa Tengah dipimpin 8 orang, sejak Pemilu

Tahun 1955 sampai sekarang yaitu :

- 1) Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
- 2) Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
- 3) Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
- 4) Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
- 5) Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
- 6) Alip Pandoyo Tahun 1997 s/d 1999;
- 7) Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
- 8) Murdoko SH, Tahun 2004 s/d sekarang

e. Arti Logo



Gambar 4. 1 Logo Jawa Tengah

- 1) Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan dasar falsafah Negara yakni Pancasila.
- 2) Laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.
- 3) Candi Borobudur melambangkan Daya Cipta yang besar Tradisi yang baik dan Nilai-nilai Kebudayaan yang khas dari Rakyat Jawa Tengah.
- 4) Gunung Kembar mempunyai arti idiil bersatunya rakyat dan Pemerintah Daerah.
- 5) Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya yang hijau menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan bermacam-macam kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan penghidupan Rakyat Jawa Tengah.
- 6) Bambu Runcing melambangkan Kepahlawanan dan Keksatriaian Rakyat Jawa Tengah.

- 7) Bintang bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga "Nur Cahaya" melambangkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa dari Rakyat Jawa Tengah.
- 8) Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran Rakyat Jawa Tengah.
- 9) Umbul-umbul Merah Putih melambangkan Daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10) Perpaduan antara Bintang, Padi dan Kapas melambangkan hari depan Rakyat Jawa Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 11) Perpaduan antara Bulir Padi yang berbiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian angka-angka yang mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat "17 Agustus 1945" yang wajib kita agungkan.

f. Nilai Budaya

Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) lingkungan budaya, yaitu Lingkungan budaya Pesisir, Lingkungan budaya Bagelan – Banyumas, dan Budaya Kraton, dengan pelestarian budaya antara lain Upacara :Tingkeban, Brokohan, Puputan, Selapanan, Tedhak Siten, Ruwatan, Bersih Desa, Siraman Pusaka, Nyadran, dan Sedekah Laut. Jawa Tengah memiliki peninggalan budaya antara lain : Candi Borobudur, Mendut & Pawon, Dieng, Gedongsongo, Prambanan.

2. Profil Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data berupa laporan tahunan yang dikeluarkan PEMDA dan laporan audit yang dikeluarkan BPK tahun 2012 - 2014 serta data luas wilayah daerah. Data tersebut dapat diperoleh di *website* resmi PEMDA tersebut dan untuk variabel Luas Wilayah berasal *website* dari Kementerian Dalam Negeri yang dapat diunduh. Data digunakan berbentuk data panel dari 25 Kabupaten/Kota dengan menggunakan 3 tahun observasi yaitu 2012-2014. Berikut akan peneliti tampilkan profil data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1
Profil Data Penelitian

	Ukuran Pemda	Tingkat Kekayaan Pemda	Tingkat Ket Pemda	Belanja Modal	Luas Wilayah	Temuan Audit	Kinerja Pemda
Mean	2.489.365.900.241	13,87	55,25	16,92	923,36	0,00689	2,81
Median	1.770.586.085.855	13,11	56,84	15,52	876,10	0,00235	2,93
Std. Dev	1.870.924.117.729	5,96	8,97	4,85	649,23	0,01168	0,37
Minimum	1.186.897.096.359	6,50	0,06	9,19	16,06	0,00003	1,58
Maximum	13.094.843.000.001	33,11	63,52	34,62	2.124,47	0,07230	3,32

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan data pada tabel 4.1. di atas, Data ukuran Pemda yang diukur dengan menggunakan total aset diperoleh nilai mean sebesar Rp 2.489.365.900.240 dengan nilai median Rp 1.770.586.085.855. Nilai minimum Rp 1.186.897.096.358 dan nilai maksimum Rp 13.094.843.000.000. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi ukuran Pemda pada periode observasi dari provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi

sebesar 1.870.924.117.729 yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data ukuran Pemda adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data tingkat kekayaan Pemda yang diukur dengan menggunakan PAD diperoleh nilai mean sebesar 13,87% dengan nilai median 13,11%. Nilai minimum 6,50% dan nilai maksimum 33,11%. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data tingkat kekayaan Pemda pada periode observasi dari provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 5,96% yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data tingkat kekayaan Pemda adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data tingkat ketergantungan Pemda yang diukur dengan menggunakan DAU diperoleh nilai mean sebesar 55,25% dengan nilai median 56,84%. Nilai minimum 0,06% dan nilai maksimum 63,52%. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data tingkat ketergantungan Pemda pada periode observasi dari provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 8,97% yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data tingkat ketergantungan Pemda adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data belanja modal Pemda diperoleh nilai mean sebesar 16,92% dengan nilai median 15,52%. Nilai minimum 9,19% dan nilai maksimum 34,62%. Hal

ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data belanja modal Pemda pada periode observasi dari provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 4,85% yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data belanja modal Pemda adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data luas wilayah kabupaten/kota diperoleh nilai mean sebesar 923,36 Km² dengan nilai median 876,10 Km². Nilai minimum 16,06 Km² dan nilai maksimum 2.124,47 Km². Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data luas wilayah kabupaten/kota pada periode observasi dari provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 649,23 Km² yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data luas wilayah kabupaten/kota adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

Data temuan audit diperoleh nilai mean sebesar 0,00689 dengan nilai median 0,00235. Nilai minimum 0,00003 dan nilai maksimum 0,07230. Hal ini menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data temuan audit pada periode observasi dari provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,01168 yang lebih besar dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data temuan audit terdapat data yang bernilai ekstrim.

Data kinerja Pemda diperoleh nilai mean sebesar 2,81 dengan nilai median 2,93. Nilai minimum 1,58 dan nilai maksimum 3,32. Hal ini

menunjukkan secara statistik bahwa kondisi data kinerja Pemda pada periode observasi dari provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi stabil karena selisih nilai antara mean dan median tidak terlalu jauh. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,37 yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa simpangan data kinerja Pemda adalah baik dan tidak ada data yang bernilai ekstrim.

B. Hasil Penelitian

1. Estimasi Model Data Panel

Estimasi model yang digunakan adalah regresi data panel yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*:

a) *Common Effect*

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan data perilaku antar individu sama dengan kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode OLS (estimasi *common effect*).

Berikut adalah hasil dari estimasi model *common effect*:

Tabel 4. 2
Hasil Estimasi *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.006309	0.113897	-0.055392	0.9560
ASET?	0.104068	0.011573	8.992608	0.0000
PAD?	0.002983	0.008121	0.367321	0.7145

DAU?	-0.004265	0.003247	-1.313502	0.1934
BM?	0.008410	0.008014	1.049462	0.2977
LUAS?	-0.009813	0.041529	-0.236289	0.8139
AUDIT?	-3.959555	3.962430	-0.999275	0.3212
<hr/>				
R-squared	0.888499			
Adjusted R-squared	0.878661			
F-statistic	90.31006			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah (2016)

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada model *common effect*, variabel yang signifikan terhadap kinerja Pemda adalah ukuran Pemda Kabupaten/Kota yang diukur dengan menggunakan jumlah aset. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel aset yang bernilai $0,0000 < 0,05$.

b) *Fixed Effect*

Dengan koefisien regresor yang sama, model ini dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek. Asumsi dalam metode ini terdapat perbedaan intersep antar objek namun intersep antar waktu adalah sama. Metode ini juga mengansumsikan bahwa *slop*-nya sama antar objek maupun antar waktunya. maka ditambahkan generalisasi secara umum sering dilakukan adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun antar waktu. Berikut adalah hasil estimasi dari model *fixed effect*:

Tabel 4. 3
Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.112943	0.097735	-1.155609	0.2541

ASET?	0.114599	0.013697	8.366726	0.0000
PAD?	-0.014559	0.008809	-1.652669	0.1055
DAU?	0.003548	0.003108	1.141690	0.2598
BM?	0.008434	0.007910	1.066215	0.2921
LUAS?	-0.072462	0.054604	-1.327057	0.1913
AUDIT?	2.395945	3.645633	0.657210	0.5145
<hr/>				
R-squared	0.964133			
Adjusted R-squared	0.939678			
F-statistic	39.42494			
Prob(F-statistic)	0.000000			
<hr/>				

Sumber: Data diolah (2016)

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada model *fixed effect*, variabel yang signifikan terhadap kinerja Pemda adalah ukuran Kabupaten/Kota yang diukur dengan menggunakan jumlah aset. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel aset yang bernilai $0,0000 < 0,05$.

c) *Random Effect*

Melalui teknik variabel dummy adanya ketidakpastian model yang digunakan dengan model *fixed effect*. Menggunakan variabel residual dapat mengatasi masalah ini, yang dikenal sebagai *random effects*. Metode ini akan memilih estimasi data panel yang mungkin saja saling berhubungan antar waktu dan individu. Dalam metode ini, suatu perbedaan intersep antar obyek dan antar waktu yang mungkin terjadi akan dimasukkan ke dalam error pada suatu model OLS, sehingga model akan efisien. Parameter-parameter yang berbeda antar objek maupun antar waktu juga akan dimasukkan ke dalam error. Karena hal ini, model efek acak sering juga disebut model komponen error (*error component model*). Berikut adalah hasil estimasi dari model *random effect*:

Tabel 4. 4
Hasil Estimasi *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.072300	0.102660	-0.704266	0.4837
ASET?	0.108423	0.010250	10.57836	0.0000
PAD?	-0.005532	0.007358	-0.751812	0.4548
DAU?	0.000312	0.002765	0.112885	0.9105
BM?	0.007295	0.007012	1.040420	0.3018
LUAS?	-0.038302	0.039457	-0.970740	0.3351
AUDIT?	-0.539641	3.234888	-0.166819	0.8680
R-squared	0.921657			
Adjusted R-squared	0.914744			
F-statistic	133.3292			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah (2016)

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada model *random effect*, variabel yang signifikan terhadap kinerja Pemda adalah ukuran Kabupaten/Kota yang diukur dengan menggunakan jumlah aset. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel aset yang bernilai $0,0000 < 0,05$.

2. Uji Kesesuaian Model

a) Chow Test dan LM Test

Berikut adalah hasil pengujian Chow Test dan LM Test:

Tabel 4. 5
Hasil Pengujian Chow Test dan LM Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.865982	(24,44)	0.0001

Cross-section Chi-square	85.065766	24	0.0000
--------------------------	-----------	----	--------

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa pada pengujian Chow Test, model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas *cross-section* F bernilai $0,0001 < 0,05$, sedangkan pada pengujian LM Test, diketahui model digunakan adalah model *random effect*. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas *cross-section Chi-square* bernilai $0,0000 < 0,05$.

b) Hausman Test

Berikut adalah hasil pengujian Hausman Test:

Tabel 4. 6
Hasil Pengujian Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.792618	6	0.0950

Berdasarkan tabel IV.7 diatas, dapat diketahui bahwa pada pengujian Hausman Test, model yang digunakan adalah model *random effect*. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas *cross-section random* bernilai $0,0950 > 0,05$.

Dari hasil pengujian Chow Test, LM Test, dan Hausman Test, dapat diketahui bahwa model yang digunakan adalah model *random effect*. Berikut adalah hasil estimasi lengkap dari model *random effect*.

Tabel 4. 7
Hasil Estimasi Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-0.072300	0.102660	-0.704266	0.4837
ASET?	0.108423	0.010250	10.57836	0.0000
PAD?	-0.005532	0.007358	-0.751812	0.4548
DAU?	0.000312	0.002765	0.112885	0.9105
BM?	0.007295	0.007012	1.040420	0.3018
LUAS?	-0.038302	0.039457	-0.970740	0.3351
AUDIT?	-0.539641	3.234888	-0.166819	0.8680
<hr/>				
R-squared	0.921657			
Adjusted R-squared	0.914744			
F-statistic	133.3292			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah (2016)

3. Interpretasi Regresi Data Panel

Dari hasil uji data panel dengan model *random effect* dihasilkan persamaan berikut:

$$\text{KINERJA}_{it} = -0,072300 + 0,108423 \cdot \text{ASET}_{it} - 0,005532 \cdot \text{PAD}_{it} + 0,000312 \cdot \text{DAU}_{it} + 0,007295 \cdot \text{BM}_{it} - 0,038302 \cdot \text{LUAS}_{it} - 0,539641 \cdot \text{AUDIT}_{it}$$

Pada persamaan di atas, ditunjukkan pengaruh variabel ukuran Pemda, tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan Pemda, belanja modal, luas wilayah, temuan audit terhadap kinerja Pemda. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut:

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Secara Individual (Uji t)

1) Ukuran Pemda terhadap Kinerja Pemda

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Jika angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai t-statistik sebesar 10,57836 dengan sig. t sebesar 0,0000 ($p < 0,05$), artinya bahwa Ukuran Pemda memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemda. Dengan kata lain, jika Ukuran Pemda nilainya naik, maka Kinerja Pemda akan naik.

2) Tingkat Kekayaan Pemda terhadap Kinerja Pemda

Kinerja Pemda.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Jika angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai t-statistik sebesar -0,751812 dengan sig. t sebesar 0,4548 ($p > 0,05$), artinya bahwa Tingkat Kekayaan Pemda memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Pemda. Dengan kata lain, jika Tingkat Kekayaan Pemda nilainya naik, maka Kinerja Pemda akan turun namun tidak signifikan.

3) Tingkat Ketergantungan Pemda terhadap Kinerja Pemda

terhadap Kinerja Pemda.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Jika angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai t-statistik sebesar 0,112885 dengan sig. t sebesar 0,9105 ($p > 0,05$), artinya bahwa Tingkat Ketergantungan Pemda memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Pemda. Dengan kata lain, jika Tingkat Ketergantungan Pemda nilainya naik, maka Kinerja Pemda akan naik namun tidak signifikan.

4) Belanja Modal terhadap Kinerja Pemda

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Jika angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai t-statistik sebesar 1,040420 dengan sig. t sebesar 0,3018 ($p > 0,05$), artinya bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Pemda. Dengan kata lain, jika Belanja Modal nilainya naik, maka Kinerja Pemda akan naik namun tidak signifikan.

5) Luas Wilayah terhadap Kinerja Pemda

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Jika angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai t-statistik sebesar -0.970740 dengan sig. t sebesar 0.3351 ($p > 0,05$), artinya bahwa Luas Wilayah memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Pemda. Dengan kata lain, jika Luas Wilayah nilainya naik, maka Kinerja Pemda akan turun namun tidak signifikan.

6) Temuan Audit terhadap Kinerja Pemda

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Jika angka signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika angka signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai t-statistik sebesar -0,166819 dengan sig. t sebesar 0,8680 ($p > 0,05$), artinya bahwa Temuan Audit memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Pemda. Dengan kata lain, jika Temuan Audit nilainya naik, maka Kinerja Pemda akan turun namun tidak signifikan.

b. Uji Koefisien Secara Simultan (Uji F)

Nilai F sebesar 133,3292 dan memiliki nilai probabilitas F sebesar 0,000, Mengingat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 adalah lebih kecil dari 5% maka disimpulkan terdapat pengaruh simultan dari variabel

ukuran Pemda, tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan Pemda, belanja modal, luas wilayah, dan temuan audit terhadap Kinerja Pemda.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,914744 atau sebesar 91,47%. Hal ini berarti kontribusi variabel ukuran Pemda, tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan Pemda, belanja modal, luas wilayah, dan temuan audit dalam mempengaruhi kinerja Pemda adalah sebesar 91,47%. Sedangkan sisanya sebesar 8,53% dipengaruhi oleh varian lain di luar model penelitian.

C. Pembahasan

1. Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran Pemda terhadap kinerja pemda di Jawa Tengah pada periode observasi 2012-2014 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara variabel ukuran pemda yang diukur dengan menggunakan total aset terhadap kinerja pemda. sesuai dengan hipotesis penelitian hasil yang menjelaskan semakin tinggi nilai aset yang dimiliki kabupaten/kota akan berdampak pada peningkatan kinerja pemda dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sijabat (2016) yang menjelaskan bahwa ukuran daerah dengan proksi nilai total aset pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia. Provinsi yang memiliki

nilai aset yang lebih besar cenderung memperoleh skor kinerja EKPPD yang lebih tinggi.

Variabel ukuran daerah dalam penelitian ini diproyeksikan dengan nilai total aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah harus didukung oleh aset yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sumber daya dan fasilitas yang baik untuk memberikan pelayanan yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan semakin besar nilai aset suatu pemda, maka diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan semakin baik pula. Hal ini didukung oleh Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian lain yang menggunakan variabel ukuran pemda antara lain Mustikarini dan Fitriyani (2012), Mangkunegara (2015) dan Budianto (2012) dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ukuran pemda mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pemda.

2. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah pada periode observasi 2012-2014 menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan antara variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat

berperan dalam kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan kinerjanya.

Tidak signifikannya variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh kabupaten/kota di Jawa Tengah belum mampu memberikan pembangunan secara merata disetiap daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang setiap pertumbuhannya harus ditingkatkan. Tujuan Pemda adalah memberikan wewenang kepada Pemda untuk mendanai sebagai wujud desentralisasi sesuai dengan potensi daerah. Dalam menilai tingkat kemandirian daerah PAD dapat dijadikan indikator sehingga semakin tinggi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah.

Kewenangan daerah dalam memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya selalu dihubungkan dengan PAD, padahal Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pengelolaan perusahaan yang memegang hasil cukup relative kecl. PAD terdiri dari Pajak Daerah, hasil pengelolaan daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UUD no. 33 thn 2004 Pemda tidak bisa memungut jenis pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang..

3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah pada periode observasi 2012-2014 menunjukkan pengaruh positif namun tidak

signifikan signifikan antara variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan PEMDA pada Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan PEMDA kepada masyarakatnya sehingga kinerja PEMDA juga semakin meningkat.

Hasil ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dalam Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang mengungkapkan bahwa *intergovernmental revenue* (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan PEMDA Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyatakan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja PEMDA Kabupaten/Kota.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dijelaskan dalam UU no. 33 thn 2004 bahwa tujuan alokasi APBN untuk pemerataan, dalam mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Inti dari DAU adalah merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan juga memberikan pembiayaan untuk daerah. Sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota. "*Block Grant*" yang artinya sifat DAU dalam penggunaannya sesuai prioritas dan kebutuhan daerah yang diserahkan

kepada daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerjanya.

4. Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah pada periode observasi 2012-2014 menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan signifikan antara variabel tingkat belanja modal pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah, maka hal tersebut akan merangsang adanya peningkatan kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah.

Hasil ini tidak sesuai dengan penjelasan Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa secara logika jika pelaksanaan kinerja semakin tinggi dalam tingkat pengawasan di pemerintah daerah maka semakin tinggi juga tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja untuk menghasilkan peningkatan kinerja PEMDA. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah. Sumarjo (2010) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah,

yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk mendapatkan atau menambah aset tetap dan aset lainnya lebih dari suatu periode yang telah ditetapkan oleh pemerintah manfaatnya digunakan untuk operasional kegiatan dan tidak untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Menurut perdirjen perbendaharaan No. Per 33/PB/2008 belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk membuat modal yang menambah aset dan mempunyai manfaat selama periode satu tahun akuntansi yang di antaranya biaya pemeliharaan agar bisa mempertahankan dan menambah manfaat dan kualitas kapasitas aset.

Belanja modal terdiri dari 5 kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung, Belanja Modal Jalan digunakan adalah kapitalisasi menjadi aset tetap yang siap digunakan.

5. Luas Wilayah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian mengenai pengaruh luas wilayah terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah pada periode observasi 2012-2014 menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan antara variabel luas wilayah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa luas wilayah daerah akan mempengaruhi pengalokasian dana dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana daerah, baik dalam mendukung penyelenggaraan

program kerja PEMDA maupun untuk fasilitas pelayanan masyarakat. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang membuktikan luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga dengan luas wilayah yang mempengaruhi jumlah alokasi daerah secara bersamaan akan mempengaruhi kinerja PEMDA. Lebih luasnya wilayah suatu daerah akan memotivasi PEMDA untuk menjalankan kinerja pemerintahan untuk memberi pelayanan terbaiknya.

6. Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian mengenai pengaruh temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah pada periode observasi 2012-2014 menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan antara variabel temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa temuan audit menganggambar adanya perilaku KKN. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja PEMDA buruk, sehingga semakin tingginya temuan audit BPK, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu PEMDA.

Kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan PEMDA atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah adalah temuan audit BPK. Adanya temuan audit BPK mengakibatkan tingkat pengawasan dan pemeriksaan semakin tinggi, sehingga semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah daerah dengan mengacu pada penilaian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan

audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu.